

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia dan berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.¹ UMKM mencakup beragam jenis usaha dengan skala yang berkisar dari kecil hingga menengah, yang beroperasi di berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, jasa, dan pertanian. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan.

Salah satu contoh nyata dari dampak positif UMKM adalah program "Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia" yang dicanangkan oleh pemerintah. Melalui program ini, UMKM didorong dan diberdayakan untuk menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas dan kompetitif. Dampak sosial dari program ini sangat besar, karena UMKM yang terlibat dalam gerakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan rasa bangga nasional terhadap produk dalam negeri.

¹ Satriaji Vinatra. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>

Program ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk-produk lokal. Hal ini membantu melestarikan budaya dan tradisi Indonesia, sekaligus memberikan dukungan yang kuat untuk produk dalam negeri. Dengan demikian, program "Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia" membantu meningkatkan citra positif tentang produk buatan Indonesia di mata dunia. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya, memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif secara sosial di Indonesia.²

Program pemberdayaan UMKM di bidang pertanian di Indonesia memiliki dampak sosial yang sangat kuat. Melalui pelatihan, dukungan teknis, dan akses pasar yang diberikan kepada para petani UMKM, tidak hanya pendapatan petani yang meningkat, tetapi juga ketahanan pangan daerah yang diperkuat. Program-program ini juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan, menjadikan mereka sebagai agen perubahan ekonomi yang signifikan. Selain itu, upaya ini memperkuat ikatan sosial dan komunitas di masyarakat pertanian, karena petani UMKM menjadi lebih terorganisir dan saling mendukung.

Pada tingkat lokal, banyak komunitas UMKM, seperti kelompok pengrajin atau produsen makanan tradisional, memainkan peran penting dalam melestarikan kearifan lokal dan budaya daerah. Mereka tidak hanya menciptakan produk dengan ciri khas lokal, tetapi juga menjaga teknik tradisional dan nilai-nilai budaya yang

² Hamzani Saputra, M. Y. (2023). Mengukir Identitas Budaya: Meningkatkan Branding Desa Wisata Sukarara Melalui Sukarara Songket Karnaval. *PENTAHHELIX: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pariwisata*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.47492/pentahelix.v1i1.12>

terkait dengan proses produksi mereka. Hal ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga memperkaya warisan budaya dan identitas daerah. Dengan melestarikan tradisi dan budaya, UMKM berkontribusi pada keberlanjutan budaya Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan lokal tetap hidup dan diteruskan ke generasi mendatang.³

Secara keseluruhan, keberadaan UMKM di Indonesia memiliki dampak sosial yang luas dan penting. Melalui berbagai program dan inisiatif pemberdayaan, UMKM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya lokal, peningkatan rasa bangga nasional, dan penguatan ikatan sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, UMKM di sektor pertanian tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan identitas Indonesia.

Pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. UMKM memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari perusahaan besar, termasuk struktur organisasi yang simpel, keterbatasan dalam keterampilan teknis, dan kurangnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Namun, meskipun memiliki kendala ini, UMKM juga memiliki kelebihan yang signifikan, seperti modal yang terbatas, kemampuan beradaptasi dengan pasar yang lebih cepat, dan pertumbuhan yang responsif

³ Rusmaniah, R., Herman, H., Indriyani, P. D., Sari, R. M., & Nugroho, D. A. (2022). Pelestarian Kuliner Lokal Jengkol Tahilala Sebagai Warisan Dan Perwujudan Nilai Budaya Banjar Di Desa Pingaran: Preservation Of Local Culinary Jengkol Tahilala As A Banjar Cultural Heritage In Pingaran Village. *Anterior Jurnal*, 21(3), 57–61. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3502>

terhadap perubahan ekonomi. Untuk mengoptimalkan potensi UMKM, konsep kewirausahaan menjadi relevan dalam pengembangan mereka. Kewirausahaan didefinisikan sebagai tindakan inovatif, pengambilan risiko, dan strategi proaktif dalam dunia bisnis. UMKM yang mengadopsi pendekatan kewirausahaan cenderung lebih inovatif dalam menciptakan produk atau layanan baru, proaktif dalam menghadapi perubahan pasar, dan bersedia mengambil risiko yang terukur untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.⁴ Dengan memadukan karakteristik khas UMKM dengan elemen-elemen kewirausahaan, negara dapat memajukan sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara, namun mereka sering menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah keterampilan teknis yang terbatas di kalangan pemilik UMKM. Banyak dari mereka mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi modern dan praktik bisnis yang efisien. Selain itu, akses sulit ke pembiayaan menjadi hambatan utama bagi UMKM, yang sering kali tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga keuangan konvensional. Manajemen yang kurang efisien juga merupakan masalah yang perlu diperbaiki, karena pemilik UMKM perlu memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk memastikan operasi bisnis mereka berjalan lancar. Terakhir, proses perizinan usaha yang rumit dan lambat dapat menjadi penghalang serius bagi UMKM. Meskipun tantangan ini ada, potensi

⁴ Gideon Setyo Budiwitjaksono, Rima Anggun Aprilya, Sintha Dayu Aringgani, Devi Istyalita, Wakhidatul Ummah, & Moch. Rizky Ramadhan. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 31–49. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110>

pertumbuhan UMKM sangat besar. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan lembaga keuangan, UMKM dapat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing suatu negara.⁵ Oleh karena itu, upaya pemberdayaan dan dukungan terus menerus dari pemerintah dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan UMKM.

Selain itu, UMKM juga memiliki potensi yang signifikan dalam kontribusi ekspor non-migas suatu negara. Melalui ekspor produk-produk khas UMKM, seperti kerajinan tangan, makanan, atau produk lainnya, UMKM dapat membantu memperluas pasar ekspor dan meningkatkan penerimaan devisa negara. Ekspor produk UMKM tidak hanya memberikan manfaat finansial langsung kepada pemilik UMKM, tetapi juga membantu mengangkat citra dan reputasi produk-produk lokal di pasar internasional. Dengan demikian, UMKM berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara di tingkat global.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengungkapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Pada tahun 2020, sektor UMKM menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam lapangan kerja, dengan menyerap sekitar 97% dari tenaga

⁵ Risnawati, Naniek. "Profil Umk, Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya." *Coopetition*, vol. 9, no. 2, 2018, pp. 145-161, doi:10.32670/coopetition.v9i2.55.

kerja di sektor non-pertanian pada tahun yang sama, yang mencerminkan peran vitalnya dalam mengurangi tingkat pengangguran.⁶

UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, menciptakan peluang ekonomi dan mendukung pemerataan distribusi keuntungan ekonomi di seluruh negeri. Ini tidak hanya memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, UMKM juga berkontribusi pada ekspor non-migas Indonesia. Pada tahun 2020, sektor UMKM menyumbang sekitar 13% dari total ekspor non-migas, menunjukkan potensi ekspor yang signifikan dari sektor ini. Hal ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan ekspor negara, tetapi juga memperluas jangkauan pasar internasional bagi produk-produk UMKM Indonesia. Kesimpulannya, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan, dan ekspor.

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia telah aktif memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan jumlah yang mencapai 64,19 juta unit usaha. Mayoritas dari UMKM ini, yakni sekitar 99,92%, termasuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil. Meskipun ada perbaikan secara keseluruhan, dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh sebagian besar

⁶ Dahiri. (2022). Analisis Penguatan Umkm Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 1–14. Retrieved from <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/14>

UMKM, sebanyak 82,9% di antaranya mengalami dampak negatif. Hanya sebagian kecil, sekitar 5,9%, yang berhasil mengalami pertumbuhan positif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadirkan oleh pandemi ini.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak serius pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti yang diungkapkan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Dunia. UMKM menghadapi tantangan besar dalam melunasi pinjaman, membayar tagihan, dan menjaga produktivitas mereka. Mereka harus menghadapi berbagai masalah seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kesulitan dalam memperoleh bahan baku, modal terbatas, penurunan jumlah pelanggan, serta hambatan dalam distribusi dan produksi. Dalam upaya mengatasi situasi ini, pemerintah telah berupaya memberikan stimulus melalui restrukturisasi pinjaman, bantuan modal tambahan, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan berbagai bentuk dukungan pembiayaan lainnya.

Pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), saat ini memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Mereka perlu terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah dan turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh dampak pandemi. Untuk mendukung mereka dalam upaya ini, pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN telah membantu UMKM bertahan dengan menciptakan lapangan kerja baru

dan mendorong pelaku usaha untuk beralih ke platform digital melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah berani dengan mengumumkan bahwa negara ini telah memasuki masa pandemi Covid-19 pada tanggal 21 Juni 2023. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yang cermat terkait dengan angka kasus harian dan tingkat antibodi di masyarakat. Meskipun status pandemi telah dicabut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia diharapkan untuk tetap menjalankan perilaku hidup sehat sebagai langkah pencegahan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor-sektor penting seperti pariwisata, transportasi, dan berbagai jasa pendukung lainnya.

Perubahan status, dalam konteks ekonomi, diharapkan akan memberikan stimulus bagi pergerakan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan transportasi. Dengan perubahan status, terdapat harapan bahwa masyarakat akan lebih aktif dalam beraktivitas, seperti bepergian dan berlibur, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor terkait. Namun, pemerintah tetap fokus pada pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, sebagai prioritas utama. Meskipun beberapa pandangan menyatakan bahwa perubahan status mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan dalam jangka pendek terhadap ekonomi domestik yang mengalami perlambatan, diharapkan langkah ini dapat memberikan sedikit dorongan positif yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan membangkitkan aktivitas ekonomi. Dengan tetap memperhatikan kontrol inflasi,

pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas harga.

Berdasarkan analisis yang lebih mendalam, perubahan status mendorong masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih bebas, sementara dampak ekonomi secara riil kemungkinan tidak akan terlalu signifikan karena batasan mobilitas yang menghalangi perekonomian telah berkurang. Meskipun ada gejala perlambatan perekonomian, perubahan ini mungkin tidak secara drastis mempengaruhi tren tersebut. Diharapkan bahwa pemerintah telah merencanakan langkah-langkah pasca pandemi untuk mengatasi potensi masalah seperti *long Covid* dan kemungkinan kembalinya kejadian luar biasa Covid-19 di masa mendatang. Tindakan pemerintah dalam merespons perubahan status dari pandemi menjadi pandemi telah mencerminkan komitmen kuat terhadap perlindungan dan pemulihan sektor bisnis UMKM. Meskipun telah beralih ke fase pandemi, pemerintah tetap mengutamakan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di tengah perubahan lanskap bisnis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Setelah mengambil langkah untuk mengatasi tantangan selama masa pandemi, pemerintah secara aktif mengarahkan fokusnya pada upaya memberikan dukungan berkelanjutan bagi UMKM. Keputusan ini sejalan dengan komitmen sebelumnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang telah memberikan dorongan signifikan untuk membantu UMKM bertahan dan beradaptasi dengan situasi baru.

Perubahan status menjadi pandemi dalam penanganan pandemi memang menandakan adanya perbaikan dalam situasi pandemi. Namun, pemerintah tetap

sadar bahwa sektor UMKM masih memerlukan perlindungan ekstra dan stimulus yang sesuai untuk memastikan kelangsungan operasional mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemberian stimulus ekonomi, restrukturisasi pinjaman, dukungan modal, dan insentif lainnya tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM dapat terus berjalan dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di tengah fase pandemi ini. Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemulihan nasional, sambil tetap menjaga kesejahteraan pemilik usaha dan pekerja yang terkait.

Kota Tangerang sebagai bagian dari wilayah Jabodetabek memiliki banyak UMKM yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Kota Tangerang memiliki keberagaman sektor UMKM, mulai dari industri manufaktur, perdagangan, jasa, hingga pertanian. Dalam hitungan beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Tangerang telah mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, membantu akses pasar, dan memberikan pelatihan dalam manajemen bisnis. Pemerintah Kota Tangerang tengah mendorong upaya untuk menginformasikan dan mempercepat peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang/jasa melalui platform E-purchasing, yang mencakup e-katalog, katalog lokal, dan bela pengadaan.

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tangerang mencatat lonjakan drastis dalam jumlah pelaku UMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi, khususnya di

wilayah Kota Tangerang. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tangerang, Nurul Hayati, pada tahun 2020-2021, terdapat 25.918 pelaku UMKM. Namun, pada tahun 2022, jumlah ini meningkat drastis menjadi sekitar 33.339, menyebabkan total pelaku UMKM di Kota Tangerang mencapai sekitar 59.317. Pertumbuhan yang mencolok ini dapat disarikan dalam beberapa faktor. Pertama, minat dan semangat warga untuk berwirausaha sangat tinggi. Kedua, UMKM telah mampu bertahan dan bahkan berkembang selama masa pandemi Covid-19. Kemampuan UMKM untuk terus beroperasi dan menyediakan produk serta layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat telah menjadi pendorong pertumbuhan yang signifikan di wilayah ini. Dengan adanya pertumbuhan UMKM yang kuat, harapannya adalah bahwa ekonomi Kota Tangerang akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang.

Dalam situasi krisis ekonomi yang melanda dunia, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sektor formal di Kota Tangerang, seperti sektor industri dan perusahaan besar, mengalami pengurangan pekerjaan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka. Dalam menghadapi lonjakan angka pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi ini, pemerintah Kota Tangerang telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satu tindakan yang diambil adalah mengintegrasikan program pemulihan ekonomi ke dalam Program Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah pusat. Fokus utama dari program ini adalah mendukung pergerakan ekonomi kerakyatan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui berbagai insentif dan dukungan, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan sektor informal dan

UMKM sebagai penyelamat bagi warga yang terdampak pengangguran dan ketiadaan pendapatan. Dengan demikian, diharapkan bahwa program-program ini dapat membantu masyarakat Kota Tangerang untuk pulih dari dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka di Kecamatan Sepatan melalui Ruang Pojok UMKM. Langkah ini diarahkan oleh PERPRES No. 12 Tahun 2021 dan Inpres No. 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan alokasi anggaran 40% untuk UMKM dan koperasi. Dengan adanya Ruang Pojok UMKM, pelaku UMKM dapat menjual produk mereka dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi daerah. Kehadiran Pojok UMKM ini memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi bisnis mereka dengan berbagai program dan layanan yang disediakan, termasuk pemasaran melalui marketplace dan peningkatan jaringan bisnis. Di samping itu, Pojok UMKM juga berfungsi sebagai wadah bagi UMKM untuk memperoleh informasi dan dukungan dalam mengembangkan usaha mereka. Pentingnya peran UMKM dalam mendukung ekonomi daerah, terutama di Kecamatan Sepatan, tercermin dari upaya pemerintah untuk memberikan ruang dan dukungan yang diperlukan. Dalam hal ini, inovasi Pojok UMKM menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tantangan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan signifikan dalam jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bukti konkret dari pemulihan ekonomi di daerah

tersebut. Kenaikan daya beli masyarakat turut memacu perkembangan UMKM, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap perekonomian regional. Di masa depan, Nurul Hayati berkomitmen untuk terus mendorong pelaku UMKM agar dapat beralih ke ranah digital. Langkah ini sejalan dengan program nasional yang bertujuan menciptakan UMKM yang beroperasi secara digital pada tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang telah merencanakan Pameran Produk Koperasi dan UMKM di Mall Ciputra Citra Raya pada bulan April 2023. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan beragam produk UMKM yang ada di wilayah Kota Tangerang dan memperluas pangsa pasar bagi para pelaku UMKM. Dengan demikian, inisiatif ini akan terus menguatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi lokal sambil memandu mereka menuju adaptasi digital yang lebih luas.

Dalam pameran ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menghadirkan sekitar 100 pelaku UMKM dengan tujuan utama memberikan mereka kesempatan berharga untuk memasarkan produk-produk unik mereka kepada masyarakat luas. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut, tetapi juga untuk mendukung perkembangan serta pertumbuhan sektor ekonomi UMKM di Kota Tangerang. Selain menjadi platform pemasaran, pihak dinas juga aktif memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM, membantu mereka memahami aspek-aspek penting dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, mereka juga memfasilitasi proses perizinan dan legalitas produk-produk tersebut, menjadikannya lebih siap untuk sukses di masa depan. Melalui upaya ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan penting dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM dan membantu para pelaku usaha meraih keberhasilan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwasanya Pemerintah Kota Tangerang masih senantiasa mendukung pergerakan UMKM di daerahnya, oleh karena itu peneliti ingin mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Tangerang tetap menjaga dan melindungi UMKM setelah fase pandemi Covid-19 berakhir. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM agar tetap berdaya dan berkelanjutan di tengah perubahan situasi pascapandemi. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis langkah konkret yang diambil untuk memastikan perlindungan, dukungan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi UMKM dalam konteks yang lebih stabil dan kondusif setelah pandemi berakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, oleh karena itu rumusan masalah yang disusun untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum pemerintahan dalam melindungi UMKM pada masa pandemi di Kota Tangerang?
2. Bagaimana penerapan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam mendukung keberlangsungan UMKM selama masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum UMKM pasca-pandemi berbasis UU No. 33 Tahun 2014 oleh pemerintah Kota Tangerang serta mengevaluasi implementasi fasilitas pembiayaan UMKM pasca-pandemi oleh pemerintah Kota Tangerang berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, guna memberikan rekomendasi kebijakan perlindungan dan pembiayaan UMKM di Kota Tangerang pasca-pandemi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana perlindungan hukum diterapkan oleh pemerintah dalam melindungi UMKM selama masa pandemi. Hal ini dapat mengenalkan pandangan baru dan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dalam konteks ekonomi yang mengalami perubahan akibat pandemi.
2. Penelitian ini dapat mengembangkan teori perlindungan ekonomi yang lebih komprehensif, dengan fokus pada UMKM. Dengan menganalisis langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga kelangsungan UMKM, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang strategi perlindungan ekonomi di tengah situasi perubahan.
3. Penelitian ini juga dapat mengilustrasikan bagaimana teori kebijakan publik diterapkan dalam konteks nyata. Melalui analisis kebijakan yang diterapkan

oleh pemerintah Kota Tangerang untuk melindungi UMKM, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan publik dalam mendukung sektor ekonomi yang rentan.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kota Tangerang, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan UMKM dalam situasi endemi. Informasi mengenai langkah konkret yang dapat diambil untuk mendukung UMKM dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif.
2. Menjadi sumber informasi dan panduan bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang dalam memahami hak-hak, perlindungan, dan dukungan yang tersedia bagi mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, pelaku UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berdaya saing.
3. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang perlindungan ekonomi, kebijakan publik, dan pengembangan UMKM. Peneliti lain dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai pijakan untuk mengembangkan studi lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, berisikan mengenai teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian, yang berisikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menjawab rumusan masalah secara mendalam sebagai hasil dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan dalam BAB II.

BAB V PENUTUP

Di Bab ini berisikan kesimpulan dan saran seluruh penelitian yang telah digunakan.